

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama Organisasi : **Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat**
2. Tugas : Memimpin, menyelenggarakan, mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian program/kegiatan di bidang perhubungan yang merupakan urusan pemerintahan provinsi, tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur
3. Fungsi :
 1. Menetapkan rumusan kebijakan strategis di sektor transportasi terkait lalu lintas, angkutan jalan dan pelayaran sesuai kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan dari Pemerintah Pusat
 2. Menetapkan rumusan kebijakan transportasi untuk mewujudkan NTB terkoneksi sesuai target RPJMD
 3. Menetapkan rumusan kebijakan pengembangan SDM perhubungan
 4. Menetapkan rencana dan pelaksanaan program transportasi terkait lalu lintas, angkutan jalan dan pelayaran sesuai kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan dari Pemerintah Pusat
 5. Menetapkan dan menyelenggarakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 6. Menetapkan dan menyelenggarakan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
 7. Menetapkan dan menyelenggarakan Program Pengelolaan Pelayaran
 8. Menetapkan rencana dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang lalu lintas, angkutan jalan dan pelayaran sesuai kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan dari pemerintah pusat.
 9. Menetapkan laporan pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi NTB.
 10. Melaksanakan koordinasi dan integrasi program/kegiatan dengan para pihak (mitra kerja di sektor transportasi)
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1.	Meningkatnya konektivitas layanan transportasi	1. Persentase Rute Angkutan Darat 2. Persentase Rute Angkutan Laut	Jumlah rute existing angkutan darat ditambah jumlah rute baru angkutan darat dibagi Jumlah rute kebutuhan angkutan darat yang beredar dikali 100 persentase. Catatan : Rute/ trayek yang merupakan titik konektivitasnya sebagai rute kebutuhan sesuai dengan Angkutan yang beredar saat ini Jumlah rute existing angkutan Laut ditambah jumlah rute baru angkutan Laut dibagi Jumlah rute kebutuhan angkutan Laut yang beredar dikali 100 persentase. Catatan : Rute/ trayek yang merupakan titik konektivitasnya sebagai rute kebutuhan sesuai dengan Angkutan yang beredar saat ini
2.	Meningkatnya keselamatan transportasi	1. Rasio Kecelakaan Transportasi	Rasio Fatalitas ditambah Rasio Kecelakaan Angkutan Penyeberangan dibagi 2. Catatan : Rasio Kecelakaan Transportasi merupakan rata-rata dari hasil penjumlahan Rasio Fatalitas dan Rasio Angkutan Penyeberangan

Mataram, 2022
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


H. LALU MOH FAOZAL, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Madya(IV/d)
 NIP. 19661231 198608 1 007